

PERAN STRATEGIS MEDIA MASSA DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Yani Paryono

Peneliti Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur
Jalan Siwalanpanji II/1, Buduran, Sidoarjo, 61252
Pos-el: yani_coll@ymail.com

Abstract

Mass media takes an important role in the various aspects of human life, especially for information. Actual and factual information from a number of events and smart ideas of humans can immediately be obtained from kinds of mass media. Mass media is not only as modern information media but it also has a strategic role in the construction and development of Indonesian. The major problem in terms of the construction and development of Indonesian among other things is caused by the way the Indonesian people live that has changed either as the result of new rule of life such as the employment of free market as the implementation of globalization era, the rapid development of technology of information or the employment of autonomy of region. That condition has influenced the Indonesian people in having a speech and using Indonesian. Therefore, the role of mass media as a medium of the construction and development of Indonesian is very significant. One of the alternatives that can be carried out by the government is by publishing several government policies to empower the mass media involved in the various activities of construction and development of Indonesian directly.

Keywords: *mass media, construction, development, and Indonesian*

Abstrak

Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya di bidang informasi. Derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan bisnis media massa akhir-akhir ini, informasi tidak hanya menjadi kebutuhan, namun sudah menjadi komoditas yang *profit oriented*. Persoalan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di masyarakat merupakan masalah yang cukup kompleks. Persoalan yang cukup mendasar kompleks terkait dengan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia antara lain, kehidupan masyarakat Indonesia yang telah berubah baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas dalam rangka globalisasi, akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat maupun pemberlakuan otonomi daerah. Media massa mampu menerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat dihindarkan. Kondisi itu telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran media massa sebagai sarana untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sangat penting. Dalam makalah ini, penulis ingin mencoba memaparkan bagaimanakah peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia? Salah satu alternatif yang dapat ditempuh pemerintah adalah dengan menerbitkan berbagai kebijakan pemerintah untuk memberdayakan media massa terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Kata kunci: media massa, pembinaan, pengembangan, dan bahasa Indonesia

1. Pendahuluan

Media massa memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Peran strategis media massa tersebut seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi manusia. Informasi terkini yang aktual dan faktual dari berbagai kejadian dan ide-ide masa depan manusia dapat dengan cepat dan mudah diperoleh dari berbagai media massa. Oleh karena itu, media massa di samping sebagai media informasi yang modern juga berperan sangat penting untuk sarana pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia

Masalah pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan budaya, sosial, politik, teknologi informasi dan kebutuhan manusia. Permasalahan yang sangat fundamental dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia antara lain disebabkan oleh perkembangan arus globalisasi, seperti pemberlakuan pasar bebas, perubahan budaya secara global, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat maupun pemberlakuan otonomi daerah. Oleh karena itu, secara langsung atau tidak langsung kondisi semacam itu akan berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berkomunikasi atau berbahasa.

Dalam berkomunikasi atau berbahasa dengan pihak lain, masyarakat dituntut dapat berkomunikasi dan bersaing secara efektif dan efisien antarsesama dalam menghadapi semua problematika kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bahasa yang komunikatif sangat diperlukan. Bahasa yang komunikatif dan efektif dapat terjadi bila pesan yang

disampaikan oleh penutur dapat diterima pihak lain dengan baik tanpa ada perbedaan persepsi tentang pesan yang disampaikan. Namun, tantangan terbesar dalam berkomunikasi di masyarakat Indonesia adalah dengan kehadiran masyarakat yang multibahasa. Dalam masyarakat yang multibahasa, keberadaan bahasa asing mulai banyak dipelajari dan dipakai dalam segala lini kehidupan di Indonesia untuk kepentingan politik, hukum, ekonomi, industri, pariwisata, budaya dan sebagainya dalam menghadapi daya saing bangsa.

Sejalan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan perkembangan waktu, bahasa Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Baik dari luas wilayah para penggunanya maupun struktur bahasa Indonesianya. Oleh karena itu, bila pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dapat berjalan dengan baik, tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia ke depan akan menjelma menjadi bahasa modern yang bermartabat, bahasa yang kaya kosakata dan berstruktur mantap sesuai dengan kebijakan bahasa nasional.

Untuk menjadikan bahasa yang modern dan bermartabat, perlu ada terobosan-terobosan konkret dan strategis memberdayakan semua media massa terlibat langsung dan tidak langsung dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan berbagai macam cara. Hal itu penting dilakukan karena media massa sebagai ujung tombak arus informasi dan menjadi pelopor terdepan perubahan ke arah yang lebih baik dalam dunia pendidikan, khususnya penggunaan bahasa Indonesia yang modern. Di samping itu, media massa juga memiliki tanggung jawab moral dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Berkenaan dengan permasalahan kebahasaan tersebut, tidak berlebihan bila pada kesempatan ini, penulis ingin

menguraikan beberapa alternatif peranan strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Masalah yang akan penulis paparkan adalah bagaimanakah peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia? Paparan tersebut, setidaknya-tidaknya, dapat dapat bermanfaat bagi pemegang kebijakan pada instansi pemerintah dan instansi swasta—sebagai pengelola media massa baik cetak maupun elektronik antara lain, 1) untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang mendasar tentang peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional; 2) memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat memberdayakan media massa dapat berperan strategis dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara sistematis dan terarah; dan 3) dapat menumbuh-kembangkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia.

Media massa atau pers merupakan Istilah yang mulai dipakai pada tahun 1920-an untuk menyebut jenis media secara khusus yang didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Definisi media massa atau pers dalam Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 1999 tentang pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa media massa merupakan sarana untuk mengakses banyak informasi yang merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam masyarakat. Media massa merupakan tempat yang sangat berpotensi untuk memproduksi dan menyebar-

luaskan makna sosial, atau dengan kata lain, media massa dapat berperan besar dalam menentukan makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia untuk budaya, masyarakat, atau kelompok sosial tertentu (<http://www.sarjanaku.com/2012/12>).

Ditinjau dari perkembangan teknologi di bidang penyampaian informasi melalui media massa menurut Eduard (1978) dalam Paryono (2013), media massa dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu media massa modern dan media massa tradisional. Media massa modern, yaitu media massa yang menggunakan teknologi modern dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti media massa cetak dan media massa elektronik. Adapun yang dinamakan media massa cetak merupakan media yang dalam menyampaikan informasi terlebih dahulu harus dicetak menggunakan alat cetak. Media massa ini misalnya, surat kabar, majalah, buletin, tabloid, dan sebagainya. Lain halnya dengan media massa elektronik, yaitu media massa yang dalam menyampaikan informasinya menggunakan jasa listrik. Tanpa adanya listrik, media massa ini tidak akan dapat berfungsi misalnya, radio, televisi, dan media massa online. Media massa tradisional merupakan media yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada zaman dahulu. Penyampaian informasi lebih banyak menggunakan media massa tradisional misalnya, wayang, lawak, lenong, seni tradisional, dan sebagainya.

Bila dilihat dari fungsinya, pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Dalam Pasal 6, UU RI Nomor 40 Tahun 1999, pers berperan: Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, Pers juga harus menghormati kebinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan

benar melakukan pengawasan; 2) Pers sebagai pelaku media informasi berfungsi untuk memberi dan menyediakan informasi tentang peristiwa yang terjadi kepada masyarakat dan masyarakat membeli surat kabar karena memerlukan informasi; 3) Pers berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat. Pers itu sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya; 4) Pers berfungsi sebagai hiburan. Pers yang memuat hal-hal yang bersifat hiburan untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel-artikel yang berbobot. Bentuk-bentuk artikel atau rubrik hiburan dalam pers dapat berupa cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, dan karikatur; 5) Pers berfungsi sebagai kontrol sosial. Fungsi ini mengandung makna demokratis karena terdapat unsur-unsur sebagai berikut: keikutsertaan rakyat dalam pemerintahan (*social participation*), pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (*social responsibility*), dukungan rakyat terhadap pemerintah (*social support*), dan kontrol masyarakat terhadap tindakan-tindakan pemerintah (*social control*); dan 6) Pers sebagai lembaga ekonomi. Perusahaan yang bergerak di bidang pers dapat memanfaatkan keadaan di sekitarnya sebagai nilai jual sehingga pers sebagai lembaga sosial dapat memperoleh keuntungan maksimal dari hasil produksinya untuk kelangsungan hidup lembaga pers tersebut.

Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media.

Keberadaan bahasa Indonesia semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Pertimbangan tersebut memperkuat (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007 tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia di daerah sekaligus melakukan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan, forum pertemuan resmi pemerintah dan pemerintahan daerah dan surat menyurat resmi.

Agar keberadaan bahasa Indonesia dapat berfungsi dengan baik sebagai bahasa nasional dan bahasa negara perlu ada pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang sistematis dan terarah. Pembinaan bahasa Indonesia menurut Sugono (2004) ditujukan pada upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Upaya itu dilakukan melalui perbaikan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk tulisan. Selain itu, pembinaan dapat menyangkut masyarakat penutur. Untuk itu, perlu intensifikasi dilakukan pemyarakatan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar ke seluruh lapisan masyarakat. Adapun Pengembangan ditu-

jukan pada upaya peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat. Perkembangan kosakata dapat diketahui dari pertambahan kata yang terdapat dalam kamus bahasa Indonesia.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah dengan melahirkan Kurikulum 2013. Kehadiran Kurikulum 2013 menempatkan bahasa Indonesia pada posisi yang sangat terhormat dan strategis karena menjadi pusat integrasi dari mata pelajaran IPA dan IPS dan menjadi penghela berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia akan berbasis teks yang menjadi paradigma perubahan bahasa. Bahasa Indonesia diharapkan dapat memperkuat jati diri anak bangsa. Dengan implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia akan sangat dihargai dan secara sistematis akan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang dihormati semua komponen bangsa.

2. Pembahasan

2.1 Peran Strategis Media Massa dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam tatanan bernegara dan berbangsa termasuk didalamnya pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa. Secara umum, pembuatan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 setidaknya memiliki tiga tujuan utama yakni, untuk (1) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik

Indonesia; (2) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (3) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Dalam Pasal 39 UU RI Nomor 24 tahun 2009, bahasa Indonesia dalam media massa diatur sebagai berikut: (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. (2) Media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus. Berdasarkan undang-undang di atas, media massa mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu merupakan salah satu wujud dari menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Adapun media massa cetak dengan sasaran tertentu dalam lingkup lokal diperbolehkan memakai bahasa daerah atau bahasa asing.

Putusan Kongres IX Bahasa Indonesia terkait dengan media massa menyatakan bahwa di tengah tantangan kebahasaan yang dihadapi bangsa Indonesia sudah sepantasnyalah apabila media massa ikut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sehingga dapat menjadi sarana pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Oleh karena itu, perlu tindak lanjut yang dilakukan media massa sebagai berikut.

- 1) Peningkatan profesionalisme di kalangan insan media massa perlu terus dilakukan dengan memperkuat dasar keterampilan berbahasa Indonesia, baik secara internal maupun melalui kerja sama lembaga-lembaga terkait.
- 2) Untuk menghindari varian bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang cenderung merusak upaya pengembangan bahasa Indonesia, perlu ada kesepahaman di kalangan pengelola

media massa untuk melahirkan bahasa Indonesia ragam jurnalistik yang baku.

- 3) Pengayaan bahasa Indonesia, khususnya menyangkut kosakata baru, oleh media massa tetap diperlukan, baik yang bersumber dari bahasa daerah maupun bahasa asing, tetapi harus menjaga keseimbangan agar tidak saling meminggirkan dan/atau mematikan.
- 4) Pusat Bahasa (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa) perlu terus menerus melanjutkan kerja sama dengan insan media massa.
- 5) Media massa perlu memberi ruang khusus atau rubrik pembinaan bahasa Indonesia.
- 6) Dunia perfilman perlu meningkatkan pemanfaatan karya sastra Indonesia dan daerah sebagai bahasa penulisan skenario serta memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Putusan Kongres IX Bahasa tersebut sudah cukup baik. Namun, menurut penulis putusan tersebut belum dapat mencerminkan sebagai upaya konkret media massa berperan strategis dalam pembinaan bahasa dan pengembangan Indonesia yang sistematis dan terarah. Kegiatan-kegiatan kebahasaan selama ini lebih banyak dilaksanakan oleh dunia pendidikan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sudah saatnya menjadi tanggung jawab media massa dalam menghadapi era pasar bebas.

Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dalam pemertabatan bahasa sudah cukup banyak, baik yang berupa kebijakan-kebijakan maupun yang berupa kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara konkret. Namun, upaya-upaya tersebut banyak mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut menurut Paryono (2013) antara lain, sebagai berikut.

- 1) Lemahnya koordinasi antarlembaga di daerah tertentu yang disebabkan oleh

persepsi yang beragam, belum ada kesepahaman tentang pentingnya pemertabatan bahasa sebagai bahasa negara;

- 2) Belum ada koordinasi dan kerja sama kegiatan kebahasaan dan kesastraan pemerintah dan media massa yang konkret dalam pemertabatan bahasa Indonesia;
- 3) Belum ada petunjuk atau pedoman yang dapat dipakai untuk seluruh aparat pemerintah di daerah dalam menertibkan penggunaan bahasa di ruang publik, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial, petunjuk jalan dan iklan, dengan pengutamaan penggunaan bahasa negara;
- 4) Dimungkinkan ada kesenjangan sistem informasi manajemen pemerintahan sehingga informasi yang diperlukan tidak sampai kepada instansi/lembaga yang memiliki kompetensi yang memadai. Kesenjangan ini sangat dimungkinkan terjadi di daerah tertentu yang terbatas ada lembaga yang memadai untuk melakukan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan. Hal ini dapat diperhatikan tidak semua kabupaten/kota memiliki perguruan tinggi;
- 5) Lemahnya upaya penggunaan bahasa Indonesia oleh sebagian badan/lembaga dan masyarakat terhadap prakarsa (inisiatif). Hal ini dapat dipahami karena sebagian masyarakat berpandangan bahwa penguasaan bahasa Indonesia tidak menjanjikan nilai ekonomi untuk mengubah kesejahteraan hidupnya. Akibat yang terjadi adalah masyarakat lebih suka mempelajari bahasa asing untuk kepentingan ekonomi yang lebih menjanjikan.

Kendala-kendala tersebut juga diperparah oleh pembelajaran bahasa Indonesia dunia pendidikan yang salah arah. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah-

sekolah unggulan tertentu cenderung semakin lama semakin diabaikan (Paryono, 2011). Hal ini merupakan salah satu indikasi makin kurangnya sikap positif pengelola pendidikan terhadap bahasa Indonesia. Kurangnya minat dan perhatian di kalangan generasi muda sekarang ini terhadap kebudayaan nasional adalah hambatan yang belum dapat diatasi untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara yang dihormati.

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, penulis ingin mencoba menguraikan bagaimanakan peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di era pasar bebas. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat Indonesia. Namun, yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah pusat dan daerah yang didukung semua lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya media massa. Media massa berperan sangat strategis dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain.

Pemerintah sebenarnya dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara maksimal, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara Lainnya, peraturan-peraturan penggunaan bahasa Indonesia, dan kebijakan-kebijakan lain melalui berbagai kementerian. Namun, karena alasan berbagai faktor dianggap belum mengenai ke sasaran. Oleh karena itu, perlu kebijakan-kebijakan pemerintah yang lebih konkret agar semua komponen bangsa terlibat langsung dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan

melibatkan media massa dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, antara lain.

a. Pembuatan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia yang berisi

- 1) Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan presiden yang mewajibkan media massa ikut bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia
- 2) Pemerintah perlu membuat pusat informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia dan daerah di tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan unsur-unsur insan media massa yang berfungsi sebagai pusat informasi dan kegiatan kebahasaan dan kesastraan di bawah koordinasi balai/kantor bahasa tingkat provinsi.
- 3) Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat kebijakan yang mewajibkan insan media massa melaksanakan Pedoman Penulisan Jurnalistik/Media Massa hasil pelatihan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PUNTI) pada tanggal 10 November 1978 di Jakarta. Kesepuluh pedoman ini berbicara tentang pemakaian ejaan, singkatan dan akronim, imbuhan, pemakaian kalimat pendek, ungkapan klise, kaki mubazir, kata asing dan istilah teknis, dan tiga aspek bahasa jurnalistik. Kesepuluh pedoman itu (Chaer, 2010) adalah:
 - a) Wartawan hendaknya secara konsekuen melaksanakan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Hal ini juga harus diperhatikan oleh para korektor karena kesalahan paling menonjol dalam surat kabar sekarang ini ialah kesalahan ejaan.

- b) Wartawan hendaknya membatasi diri dalam singkatan atau akronim, bila harus menulis akronim, satu kali ia harus menjelaskan dalam tanda kurung kepanjangan akronim tersebut supaya tulisannya dapat dipahami oleh khalayak ramai.
 - c) Wartawan hendaknya tidak menghilangkan awalan atau prefiks. Pemenggalan /-an/ dan /me-/ dapat dilakukan dalam kepala berita mengingat keterbatasan ruang. Akan tetapi, pemenggalan jangan sampai dipukul rata sehingga merembet pula ke dalam tubuh berita.
 - d) Wartawan hendaknya menulis dengan kalimat-kalimat pendek. Pengutaraan pikiran harus logis, teratur, lengkap dengan kata pokok, sebutan, dan kata tujuan subjek, predikat, objek). Menulis dengan induk kalimat dan anak kalimat yang mengandung banyak kata mudah membuat kalimat tidak dapat dipahami, lagi pula prinsip yang harus dipegang ialah “satu gagasan atau satu ide dalam satu kalimat”.
 - e) Wartawan hendaknya menjauhkan diri dari ungkapan klise atau stereotipe yang sering dipakai dalam transisi berita seperti kata-kata *sementara itu, dapat ditambahkan, perlu diketahui, dan dalam rangka*. Dengan demikian, dia menghilangkan monoton (keadaan atau bunyi yang selalu sama saja) dan sekaligus dia menerapkan ekonomi kata atau penghematan dalam bahasa.
 - f) Wartawan hendaknya menghilangkan kata mubazir seperti *adalah* (kata kerja kopula), *telah* (penunjuk masa lampau), *untuk* (sebagai terjemahan “to” dalam bahasa Inggris), *dari* (sebagai terjemahan “of” dalam hubungan milik), *bahwa* (sebagai kata sambung) dan bentuk/jamak yang tidak perlu diulang.
 - g) Wartawan hendaknya mendisiplinkan pikirannya supaya jangan campur aduk dalam satu kalimat bentuk pasif /di-/ dengan bentuk aktif /me-/.
 - h) Wartawan hendaknya menghindari kata-kata asing dan istilah-istilah yang terlalu teknis ilmiah dalam berita. Kalaupun terpaksa menggunakannya, maka satu kali harus dijelaskan pengertian dan maksudnya.
 - i) Wartawan hendaknya sedapat mungkin menaati kaidah tata bahasa.
 - j) Wartawan hendaknya ingat bahasa jurnalistik ialah bahasa yang komunikatif dan spesifik sifatnya, dan karangan yang baik dinilai dari tiga aspek yaitu isi, bahasa, dan teknik.
- 4) Pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa yang dipelopori media massa dengan melibatkan semua unsur masyarakat;
 - 5) Pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah yang mewajibkan setiap calon CPNS, Calon Anggota TNI, dan Polri wajib mahir berbahasa Indonesia dengan dibuktikan dengan hasil Uji kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
 - 6) Pemerintah perlu membuat peraturan yang mewajibkan tenaga kerja asing di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi.
 - 7) Semua kepala daerah yang meliputi gubernur, bupati/walikota diwajibkan ikut bertanggung jawab dan terlibat langsung mengimplementasikan untuk UU RI Nomor 24 tahun 2009 tentang kebahasaan kepada semua komponen masyarakat, terutama kepada media

massa baik cetak maupun elektronik;

- 8) Pemerintah daerah perlu menerbitkan perda pengaturan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah sebagai acuan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan melibatkan unsur insan media massa sebagai pelopor kegiatan kebahasaan dan kesastraan Indonesia;
 - 9) Pemerintah pusat dan daerah diwajibkan membantu pendanaan organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan seperti MLI, HPBI, dan MGMP, dan KKG yang bekerja sama dengan media massa dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
- b. Peran strategis media massa dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.
- 1) Semua hasil penelitian kebahasaan dan kesastraan produk lembaga kebahasaan dan kesastraan baik di lembaga pusat dan di daerah secara berkelanjutan perlu ditindaklanjuti pemerintah dan dipublikasikan melalui media massa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2) Media massa, secara berkesinambungan, perlu dilibatkan langsung dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan Indonesia secara terprogram, terstruktur, dan sistematis dalam bentuk pembuatan media informasi seperti majalah, buletin, tabloid, atau koran dengan melibatkan masyarakat luas untuk kepentingan pemertabatan bahasa Indonesia dan dibagikan gratis kepada masyarakat luas.
 - 3) Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, pemerintah dalam hal ini

diwakili Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud dan balai/kantor bahasa di tingkat provinsi perlu bekerja sama dan melibatkan insan media massa dalam mengemas bentuk kegiatan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia agar lebih kreatif, inovatif, dan menarik masyarakat. Perlu diingat bahwa hampir 95 % keberadaan media massa berorientasi bisnis. Oleh karena itu, semua kegiatan kebahasaan dan kesastraan yang bertujuan untuk memertabatan bahasa dan sastra Indonesia harus menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak media massa.

Kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia yang inovatif dan kreatif berkaitan dengan peningkatan kreativitas generasi muda sebagai generasi pelapis kita. Kegiatan kreativitas itu dilakukan melalui induk kegiatan bengkel bahasa dan sastra. Kegiatan kreativitas ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual generasi muda seperti yang diharapkan masyarakat melalui putusan Kongres IX Bahasa Indonesia. Kegiatan pembinaan bahasa dan sastra yang kreatif dan inovatif dalam bengkel bahasa dan sastra yang perlu dilakukan bekerja sama dengan insan media massa antara lain berupa berbagai pelatihan, seperti (1) pelatihan penulisan jurnalistik; (2) pelatihan penulisan puisi; (3) pelatihan penulisan cerita pendek, (4) pelatihan penulisan naskah drama dan pendramaan, (5) pelatihan musikalisasi puisi, (6) pelatihan pembawa acara (pewara) berbahasa Indonesia; (7) pelatihan penulisan karya ilmiah, (8) pelatihan penulisan proposal,

dan (9) pelatihan penulisan esai sastra dan bahasa. Sasaran kegiatan ini adalah siswa, mahasiswa, santri, guru, pengamen, dan anak jalanan, karang taruna, dan pekerja seks komersial (PSK).

Kegiatan-kegiatan yang bersifat lomba-lomba meliputi 1) lomba pidato berbahasa Indonesia; 2) Lomba menulis proposal penelitian berbahasa Indonesia; 3) lomba bercerita berbahasa Indonesia; 4) lomba penulisan cerita pendek; 5) lomba majalah dinding; 6) lomba baca berita; 7) lomba musikalisasi puisi; 8) lomba penulisan puisi remaja; 9) lomba yel-yel bahasa; 10) lomba membuat iklan berbahasa Indonesia; 10) lomba mengulas karya sastra; 11) pemilihan duta bahasa, dan sebagainya. Adapun kegiatan yang bersifat meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia adalah berupa penyuluhan kebahasaan dan kesastraan, misalnya (1) penyuluhan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, (2) penyuluhan penulisan bahasa surat dinas, (3) penyuluhan teori, metode, dan apresiasi sastra untuk pengajaran sastra.

Kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra tersebut akan membosankan bila hanya dilaksanakan tanpa dikemas dalam bentuk kegiatan yang kreatif, inovatif dan menarik.

3. Penutup

3.1 Simpulan

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sudah banyak dilakukan pemerintah dari masa ke masa. Namun, upaya-upaya tersebut masih mengalami berbagai hambatan baik karena perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi, perubahan politik, ekonomi, maupun adanya pasar bebas

dan kontak budaya antarbangsa. Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya yang dapat ditempuh pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang memberi tanggung jawab kepada semua komponen bangsa termasuk di dalamnya media massa. Adapun peran strategis media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah dengan cara membuat kebijakan pemberian tanggung jawab yang besar kepada media massa agar terlibat langsung dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

3.2 Saran

Berkenaan dengan makalah ini, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut 1) pemerintah perlu memberikan peran strategis bagi media massa dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang konkret dan 2) lembaga bahasa seyogyanya dapat membuat program pembinaan kreatif, inovatif dan menarik bekerja sama dengan media massa sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dendy Sugono. 2011. *Pemanfaatan Bahasa Daerah dalam Pengembangan Bahasa Indonesia Media Massa*: Makalah: Diskusi Forum Bahasa media Massa, 27 Januari 2004. Suara Merdeka di Semarang.
- 2011. *Kumpulan Putusan Kongres Bahasa Indonesia I—IX Tahun 1938—208*. Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Chaer, Abdul. 2010. *Bahasa Jurnalistik*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Depari, Eduard dkk, Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan Suatu.
- _____. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1992 tentang Pers*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Paryono, Yani. 2011. "Implementasi Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Bertaraf Internasional di Indonesia" dalam *Prosiding Forum Peneliti di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdiknas.

Sumber internet:

- _____. Dokumentasi Kurikulum 2013 ([http://kangmartho.com/2012/12/06/](http://kangmartho.com/2012/12/06/http://berita.upi.edu/2013/07/24/martabat-bahasa-indonesia-ayat-ayat-syukur-dalam-kuriku-lum-2013/) <http://berita.upi.edu/2013/07/24/martabat-bahasa-indonesia-ayat-ayat-syukur-dalam-kuriku-lum-2013/>), diakses pada 15 Agustus 2013.
- <http://balaibahasabandung.web.id/bli/index.php/opini/10-bahasa-di-media-massa>. Diakses pada 15 Agustus 2013.
- <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-media-massa-menurut-pada.html>. Diakses pada 15 Agustus 2013.